

REALISASI VAKSINASI NASIONAL DALAM PERSPEKTIF *AGILE GOVERNANCE*

Ummu Habibah Gaffar

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari kondisi empirik mengenai realisasi vaksin yang berlangsung di Indonesia. Dengan mengambil kasus di Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan menjadi perhatian nasional mengenai realisasi vaksin dengan kondisi yang problematis, satu sisi stok ketersediaan vaksin yang tertinggi di Indonesia, namun disisi lain tingkat realisasi vaksin yang masih rendah. Kondisi ini memantik perhatian mengenai realisasi vaksin dengan mengajukan pertanyaan bagaimana peran dan kontribusi pemerintah dalam merealisasikan vaksin serta respon masyarakat dalam menyikapi vaksinasi nasional di Kalimantan Selatan. Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah *Agile Governance*. Pendekatan ini setidaknya untuk memotret peran dan kontribusi pemerintah dalam kesiapannya merealisasikan vaksin nasional.

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif dengan memadukan pada observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi vaksin yang rendah di Kalimantan Selatan di sebabkan oleh adanya resistensi dari masyarakat yang menolak untuk divaksin. Resistensi ini dipicu dari polarisasi pemberitaan mengenai vaksin yang kebanyakan lebih tendensius pada hal yang negatif. Implikasinya berdampak pada keyakinan masyarakat mengenai vaksin yang terbangun dengan citra yang buruk. Studi ini memberikan insentif teoritis dalam memahami kembali konsep *Agile Governance*.

Kata Kunci: *Agile Governance; Partisipasi; Vaksinasi; Covid-19; Pemerintah Daerah.*

Abstract

This research departs from empirical conditions regarding vaccines that take place in Indonesia. By taking the case in South Kalimantan. South Kalimantan has become a national concern regarding the realization of vaccines with problematic conditions, on the one hand the stock of vaccine availability is the highest in Indonesia, but on the other hand the realization of vaccines is still low. This condition sparked attention regarding the realization of vaccines by asking questions about the role and contribution of the government in implementing vaccines and the response of the community in responding to national vaccinations in South Kalimantan. The approach used in this research is agile governance. This approach is at least to capture the role and contribution of the government in its readiness to realize a national vaccine.

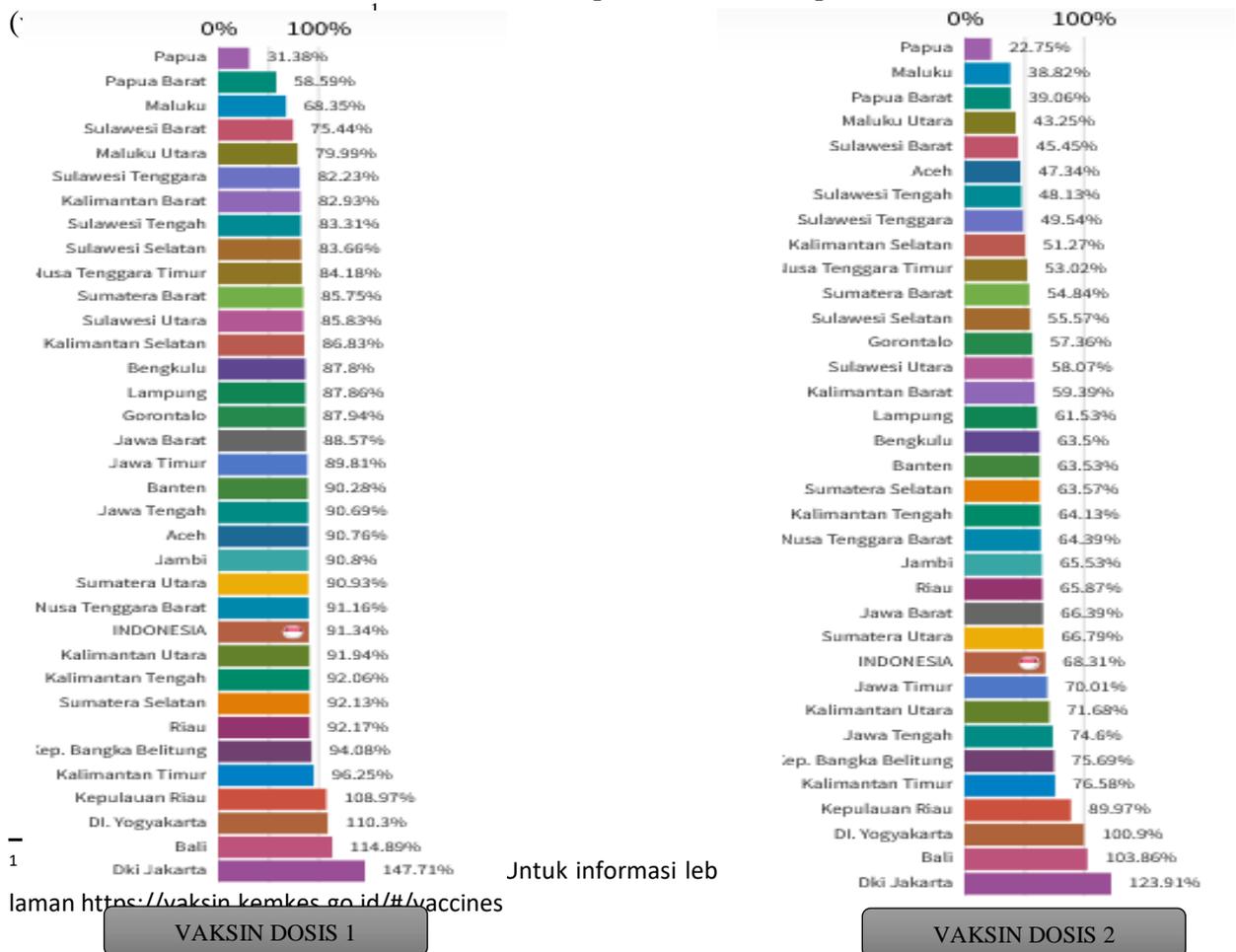
The method used in this study is qualitative by combining field observations. The results showed that the low realization of vaccines in South Kalimantan was caused by resistance from the community who refused to be vaccinated. This resistance was triggered by the polarization of news about vaccines, which tended to be mostly negative. The implication is that it has an impact on people's beliefs about vaccines that are built with a bad image. This study provides a theoretical incentive to re-understand the concept of Agile Governance

Key Word: *Agile Governance; Participation; Vaccinations; Covid-19; Local government.*

LATAR BELAKANG

Setahun terakhir ini pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan vaksinasi nasional. Gerakan vaksinasi sebagai upaya preventif terhadap penyebaran Covid-19 di Indonesia. Sayangnya, upaya yang dilakukan tidak berlangsung mulus. Dari target yang telah ditentukan, ternyata realisasi vaksin nasional hingga awal tahun 2022 baru menyentuh di angka 89.00%. Meskipun, berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah. Di lapangan, semacam ada resistensi masyarakat terhadap pemberian vaksin yang disinyalir sebagai penyebab mandetnya realisasi vaksinasi nasional. Mulai dari sikap ketidakpercayaan terhadap vaksinasi, narasi soal vaksin yang tendensius negatif serta narasi-narasi soal bisnis vaksin. Berbagai keriuhan yang berlangsung seputar vaksin, berdampak domino pada realisasi vaksinasi nasional tidak sesuai dengan target.

Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang realisasi vaksin nasional masih sangat rendah. Data yang telah dirilis oleh Kementerian Kesehatan menempatkan Kalimantan Selatan di sepuluh besar sebagai provinsi yang realisasi vaksin untuk dosis ke dua terendah di Indonesia. Dengan presentase 51.27 % untuk dosis kedua sementara untuk dosis pertama mencapai 86, 93 %



1 laman <https://vaksin.kemkes.go.id/#/vaccines>

VAKSIN DOSIS 1

VAKSIN DOSIS 2

Data lain menyebutkan bahwa sampai pekan ke Empat Februari 2022, penduduk yang telah divaksin di Kalimantan Selatan baru mencapai 2.715.201 jiwa dari total penduduk sebanyak 3.161.137 jiwa atau setara dengan 85,91% untuk realisasi pada vaksin pertama. Sementara untuk dosis kedua lebih rendah lagi, dari total penduduk yang ada baru sekitar 1.564.801 atau setara dengan 49,50% yang telah mendapatkan vaksin kedua. Hal ini tentu sangat mengejutkan banyak pihak. Pasalnya, targer vaksinasi nasional yang telah dicanamkan oleh pemerintah pusat sejauh ini berkisar antara 67,04%, untuk dosis kedua dan 90,65% untuk dosis pertama (Media, 2022).

Persoalan lain yang juga tidak kalah menariknya adalah ketersediaan vaksin di Kalimantan Selatan. Realisasi vaksinasi nasional berbanding terbalik dengan ketersediaan vaksin. Sebuah sumber menyebutkan bahwa sebanyak 132.760 dosis stok vaksin yang akan kadaluarsa per 28 Februari 2022. Dengan angka ketersediaan vaksin ini, sekaligus menempatkan Kalimantan Selatan sebagai provinsi tertinggi ketersediaan stok vaksin di Indonesia (Media, 2022)

Fenomena ini memantik banyak pertanyaan. Mulai dari pendekatan pemerintah setempat dalam mendistribusikan vaksin, termasuk dalam hal yang paling penting adalah partisipasi masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Artikel ini sendiri mengajukan dua hipotesa menanggapi persoalan anomali tingkat ketersediaan vaksin dengan realisasi vaksin. Pertama, realisasi vaksin rendah disebabkan oleh partisipasi masyarakat untuk ikut terlibat pada vaksin yang juga rendah. Imbasnya pada ketersediaan stok vaksin sampai pada batas yang hampir kadaluarsa. Kedua, minimnya peran dan keterlibatan pemerintah dalam merealisasikan vaksin nasional. Hipotesa ini akan dilihat dengan kecamata analisis *Agile Governance*.

Penting untuk dicatat, bahwa penelitian yang ada mengenai Covid-19 masih minim yang melihat dari aspek penyelenggaraan vaksinasi dengan menempatkan pemerintah sebagai centrum analisis. Sejauh ini, kebanyakan studi masih berfokus pada persoalan regulasi atau jika tidak melihat pada aspek dampak Covid-19 (Guridno & Guridno, 2020; Iriani et al., 2021; Nugroho et al., 2018; Salahudin, 2020; Suryahadi et al., 2010; Yuniti et al., 2020). Imbasnya, narasi yang ada seringkali tidak berbanding. Malah sebaliknya, menempatkan posisi pemerintah sebagai aktor yang dianggap “gagal” dalam upaya vaksinasi. Kesimpulan ini tidak sepenuhnya salah, tetapi juga mengandung sisi yang problematis. Pasalnya, bangunan argumen yang disusun sejak awal berupaya mengeliminasi peran dan

keterlibatan pemerintah dengan memberi porsi yang sangat sedikit dalam menyusun argumen.

Penelitian ini, berupaya untuk mengambil posisi yang berbeda dari kebanyakan studi yang ada sebelumnya. Dengan memperbesar porsi pada pemerintah, dalam hal ini mengeksplorasi lebih jauh bagaimana peran dan keterlibatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam merealisasikan vaksinasi serta pendekatan yang dibangun kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam vaksinasi atau sebaliknya. Kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan, menjadi pemantik yang menarik untuk menelisik lebih jauh, fenomena penerimaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19.

TINJAUAN PUSTAKA

Agile Governance

Perkembangan literatur mengenai *governance* semakin kompleks. Kini, varian *agile governance* sebagai satu perspektif mulai ramai diperbincangkan di kalangan akademik. Kemunculannya sejak lima tahun terakhir semakin mendapat panggung di dunia akademik (Halim et al., 2021). Tidak sedikit yang menggunakan pendekatan ini untuk melihat persoalan tata kelola pemerintahan, terutama dalam memotret kecepatan pemerintah untuk merespon sebuah persoalan. Tidak bisa dipungkiri bahwa, kini semakin banyak diminati terutama karena kebaruan cara pandang yang menurut sebagian peneliti sangat relevan dalam melihat perkembangan dan situasi pemerintahan di Indonesia, lebih spesifik pada pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.

Gagasan *agile governance* yang menekan pada aspek “kecepatan” dan atau “ketangkasan” pemerintah menjadi kata kunci dalam konsep ini (Apriliyanti et al., 2021; J.H.de O.Luna et al., 2014; Lappi et al., 2018; Soe & Drechsler, 2018; Vernanda & Negar, 2009). Pemerintah dituntut untuk bisa bersikap dan bertindak cepat dalam menyelesaikan persoalan. secara konseptual, terlihat bahwa *agile governance* tidak menghendaki adanya persoalan yang lama dan berbelit-belit. Situasi ini tentu mendapat tantangan tersendiri khususnya untuk konteks di Indonesia. Sebab, keputusan pemerintahan yang seringkali di lapangan berbenturan dengan banyak hal. Salah satu diantaranya adalah konflik lintas sektoral dan konflik kepentingan kelembagaan (Gerster & Dremel, 2018). Namun terpenting, dibalik kerumitan yang ada *agile governance* setidaknya menawarkan sebuah pandangan tentang percepatan layanan khususnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang partisipatif (Qumer, 2008).

Prinsip-Prinsip Agile Governance

Agile governance sebagai salah satu model penyelenggaraan pemerintahan yang mengdepankan kecepatan dan ketepatan (Soundararajan et al., 2020). Dengan tujuan, agar organisasi publik dapat berjalan dengan cepat. Karakteristik ini secara tidak langsung dapat dilihat dari prinsip dasar *agile governance*. Setidaknya, ada enam prinsip dasar yang ada pada *agile governance*. Beberapa diantaranya yaitu,

prinsip *Based On Quick Win* (Luna et al., n.d.). Prinsip *Based On Quick Win* menjadi ciri utama dalam penyelenggaraan *agile governance*. Sebab, prinsip ini sejatinya melihat bahwa layanan yang dilakukan harus cepat. Penting untuk dicatat, cepat di sini bukan hanya dalam hal waktu namun harus diiringi dengan kualitas. Artinya, pekerjaan yang dilakukan harus cepat dan tepat sasaran (Luna, n.d.).

Prinsip kedua, yaitu sistematis dan adaptif. Pada prinsip kedua ini penekanannya terletak pada sistematika kerja yang harus jelas dan terukur. Proses kerja cepat tidak hanya berlangsung pada kualitas dan waktu namun memiliki ritme kerja yang bisa dipahami oleh seluruh perangkat organisasi. Pada tahap ini, organisasi biasanya melakukan penyesuaian terhadap kondisi yang dihadapi. Proses mencoba dan mengadopsi cara kerja lain sebagai salah satu pola yang terus dilakukan. Tujuannya untuk menciptakan ketepatan kerja dalam organisasi. Prinsip ketiga, *Simple Design and Continuous Refinement*. Poinnya bahwa ditahap ini *agile governance* tidak berhenti. System kerja yang telah dibangun sebelumnya berkelanjutan, terus menerus. Dalam perkembangan, prinsip ini banyak diadopsi khususnya untuk melihat sebuah persoalan yang sifatnya statif. Peneliti mengadopsi prinsip-prinsip *agile governance* untuk melihat efektifitas dan realisasi vaksinasi yang berlangsung di Kalimantan Selatan (Luna, n.d.; Luna et al., n.d.).

Prinsip ke empat yang terdapat pada *agile governance* adalah *Good Enough Governance*, pada prinsip ini *agile governance* dituntut untuk terus melakukan penyesuaian organisasi sesuai dengan perubahan yang terjadi. *Agile governance* memandang bahwa organisasi tidak boleh stagnan hanya pada satu kondisi yang ada. Asumsi yang dibangun pada prinsip ini, pemerintahan yang tangkas, cepat dan responsif dalam menangani masalah hanya bisa berlangsung ketika organisasi publik mampu melakukan perubahan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Cara pandang ini menempatkan konsen perubahan yang berasal dari luar. Dengan adanya desakan dari luar, organisasi publik melakukan perubahan. Sebaliknya, lambatnya organisasi publik termasuk dalam hal ini pemerintah merespon kondisi yang terjadi dapat dilihat sebagai minimnya penyesuaian dan perubahan yang dilakukan oleh organisasi publik/pemerintah daerah.

Prinsip kelima *agile governance* yaitu *Business – Driven*. Prinsip ini mengarahkan organisasi publik/pemerintah daerah untuk melakukan perubahan dengan cepat. Perubahan yang cepat di sini di maksudkan untuk merespon dinamika ekonomi yang berlangsung di sekitar organisasi publik. Secara sederhana, prinsip ini menempatkan cetrum perubahan yang berlangsung dari luar. Sama halnya dengan prinsip *good enough governance* yang melihat perubahan dari luar, hanya yang menjadi pembeda pada prinsip *business-driven* perubahan ekonomi menjadi penopang utama. Orientasi organisasi publik/pemerintah daerah lebih condong pada aspek ekonomi. Hal ini bukan berarti bahwa pendekatan ini mengabaikan layanan sebagai domain penting dalam organisasi publik. Namun, perlu ditekankan bahwa orientasi bisnis memiliki pengertian yang lebih fleksibel. Bahwa organisasi publik/pemerintah daerah tidak hanya bertumpu pada perbaikan layanan publik. Tetapi, seiring melakukan layanan publik yang prima organisasi publik/pemerintah

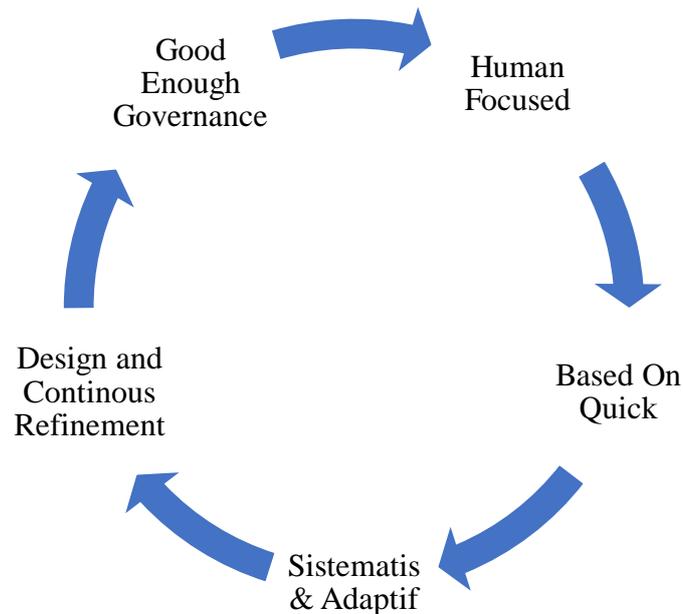
daerah juga secara bersamaan mendorong kemandirian organisasi publik dalam hal ini memiliki insentif ekonomi. Pandangan ini selaras dengan cara pandang *Re-Inventing Governnet* yang memiliki kesamaan pada dorongan dan orientasi pada aspek ekonomi (Demircioglu, 2017; Haque, 2003).

Prinsip terakhir pada *agile governance* adalah *Human Focused*. Perhatian utama prinsip ini terletak pada masyarakat. Prinsip ini membangun argumen, bahwa masyarakat tidak lagi boleh ditempatkan sebagai sesuatu yang pasif. Namun sebaliknya, masyarakat perlu diberikan ruang yang leluasa untuk ikut terlibat dan berpartisipasi dalam tata kelola pemerintah (*governance*). Bagi cara pandang ini, kehadiran masyarakat dalam *governance* dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat sekaligus di saat bersamaan membuka ruang pemerintah untuk merangkul masyarakat. Desain pada prinsip memotret dua hal sekaligus. Pada satu sisi masyarakat diberikan akses dan sisi lainnya pemerintah membuka akses. Meskipun aspek yang sangat ditekankan pada prinsip ini adalah masyarakat. Sehingga tidak berlebihan jika partisipasi menjadi kata kunci pada prinsip ini. Selaras dengan paradigma *governance* (Andrews, 2008; Chhotray & Stoker, 2009; Dacu et al., 2002; Gerring et al., 2005; Gibson, 2005; Griffin, 2012; Williams & Young, 1994; Williamson, 2002), partisipasi menjadi salah satu kunci yang dapat mendorong terselenggaranya tata kelola pemerintah yang ideal.

Agile Governance Sebagai Sebuah Pendekatan Melihat Vaksinasi Nasional

Dari uraian diatas mengenai prinsip dasar dari *agile governance* terlihat bahwa roh dari *agile governance* adalah pelayanan yang cepat, tepat dan responsif. Pelayanan yang berorientasi pada perubahan yang berlangsung di lingkungan organisasi publik. Singkatnya, bahwa jika pemerintah daerah atau organisasi publik menghendaki perubahan dan pelayanan yang cepat diperlukan semacam penyesuaian. Perubahan yang cepat hanya bisa terjadi ketika penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan organisasi publik seiring dengan perubahan yang terjadi. Dikhawatirkan bahwa, apa yang berlangsung di luar organisasi publik justru tidak direspon dengan baik oleh organisasi publik yang pada dampak dominonya pada kualitas layanan publik yang diberikan.

Pada konteks penelitian ini, penulis tidak akan menggunakan secara keseluruhan prinsip dari *agile governance*. Hanya mengambil beberapa dari prinsip *agile governance*. Beberapa diantaranya seperti *human focused*, *based on quick* dan *design* serta *continuous refinement*. Pertimbangan memilih tiga prinsip setelah mempertimbangkan beberapa aspek. Diantaranya, fenomena yang diamati mengenai realisasi vaksin merupakan program pemerintah pusat. Meskipun program ini pada konteks tertentu menjadi sesuatu yang sifatnya relatif memaksa. Dengan sifat dan karakteristik ini, penulis menganggap bahwa ketiga prinsip menjadi sangat relevan untuk melihat fenomena realisasi vaksin di Indonesia khususnya yang berlangsung di Kalimantan Selatan. Sebagai ilustrasi dari prinsip *agile governance* dapat dilihat pada siklus berikut ini:



Sumber: (Luna et al., n.d.; Marinho & Moura, 2019)

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan mempertimbangkan beberapa aspek, diantaranya karakteristik penelitian. Penelitian ini adalah penelitian eksploratif yang akan lebih banyak menggali dan mengabstraksikan pengalaman-pengalaman lapangan, dalam hal ini pengalaman pemerintah Kalimantan Selatan dalam mensukseskan gerakan vaksinasi. Pengalaman-pengalaman lapangan kemudian di abstraksikan dengan merujuk pada konsep besar yang digunakan pada penelitian ini yaitu *agile governance*. Pendekatan *agile governance* digunakan untuk menjawab rumusan pertanyaan yang telah dibangun, bagaimana pemerintah menggerakkan masyarakat pada satu sisi dan pada sisi lain mengelola pemerintahan (*governance*) sehingga dapat merealisasi vaksinasi serta bagaimana upaya resistensi masyarakat menyikapi vaksin.

Untuk menjawab pertanyaan itu, data dikumpulkan di lapangan dengan cara wawancara dan melakukan observasi langsung. Observasi langsung dilakukan dengan melihat, mengamati realisasi vaksinasi nasional. Sementara itu, untuk wawancara dilakukan dengan menggali informasi sebanyak-banyaknya dari informan. Selain itu, data dan informasi juga diperoleh dari sumber-sumber sekunder, seperti diantaranya laporan dan hasil rilis dari instansi dan institusi yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Misalnya, pada data dan informasi yang dirilis oleh pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS), data dan informasi yang bersumber dari media baik cetak maupun online. Laporan secara berkala dari gugus tugas pengendalian Covid-19 juga menjadi rujukan data dan informasi yang akan digunakan pada penelitian ini.

Tahap terakhir dari rangkaian pengumpulan data ini adalah uji validasi. Untuk uji validasi digunakan teknik trias angulasi. Proses trias angulasi bertujuan untuk memberikan perbandingan yang akan memperkuat atau justru sebaliknya data dan informasi yang dilakukan sebelum akhirnya disajikan dalam bentuk laporan (artikel). Trias angulasi dilakukan pada sumber informasi dan data. Artinya data yang diperoleh tidak langsung diolah, tetapi dibenturkan dengan sumber data dan informasi dari hasil wawancara atau observasi begitupun sebaliknya.

Tahap terakhir adalah penyajian data. Seluruh data disajikan melalui interperatif dengan menarasikan seluruh temuan-temuan lapangan. Berikutnya, data yang telah dinarasikan dianalisis dengan menggunakan kecamatan *agile governance*. Pada tahap ini menjadi terpenting sebab bagian ini akan memberikan jawaban dari pertanyaan yang telah disajikan di awal penelitian. Sebagai penutup, akan ditarik kesimpulan. Sebagai ilustrasi, berikut ini rangkaian yang kira-kira akan dilakukan selama penelitian, dari sejak proses persiapan penelitian hingga proses pelaporan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Human focused: Ruang Partisipasi Masyarakat

Dengan mengacu pada data yang telah disebutkan sebelumnya, terlihat bahwa realisasi vaksinasi di Kalimantan Selatan yang relatif masih rendah. Jika melihat dengan kecamatan *agile governance* khususnya menggunakan prinsip *human focused* dapat dikatakan realisasi vaksin yang relatif rendah karena adanya ruang partisipasi masyarakat yang belum terkoneksi dengan program vaksinasi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Luna bahwa salah satunya faktor yang mendorong layanan pemerintahan yang cepat, tepat dan tanggap karena adanya ruang partisipasi masyarakat (Luna et al., n.d.; Marinho & Moura, 2019). Pandangan ini melihat bahwa, kualitas layanan bisa saja berbanding lurus dengan keikutsertaan masyarakat. Sebaliknya, ketika keikutsertaan masyarakat dalam hal ruang partisipasi masyarakat terbatas maka pandangan ini melihat program yang akan dilaksanakan cenderung tidak efektif bahkan pada konteks tertentu dapat berdampak pada kegagalan.

Untuk konteks di Kalimantan Selatan, realisasi vaksinasi masih minim karena ruang partisipasi masyarakat yang belum terintegrasi pada program vaksinasi. Temuan penulis dari hasil wawancara dan observasi menemukan bahwa ruang partisipasi yang sempit misalnya terlihat pada keterlibatan aparat desa. Sangat minim keterlibatan aparat desa untuk terlibat pada kegiatan menyukseskan vaksinasi yang berlangsung di Kalimantan Selatan. Padahal, secara politik kepala desa memiliki posisi yang sangat strategis. Salah satu diantaranya, ikatan emosional yang cukup kuat antara kepala desa dengan warga setempat. Kalaupun ada yang terlibat, tidak secara maksimal. Jangankan masyarakat, aparat desa sendiri masih banyak yang belum sepenuhnya paham mengenai program vaksinasi nasional yang telah dicanamkan oleh pemerintah. Banyak aparat desa, seperti oknum RT yang belum memahami mengenai kegiatan vaksin. Perlu dicatat, bahwa

memang selama ini kegiatan vaksinasi nasional masih lebih banyak dinahkodai oleh tenaga kesehatan di daerah-daerah termasuk di Kalimantan Selatan.

Wujud dari minimnya partisipasi masyarakat yang lain, keterlibatan tokoh masyarakat yang jarang di ikutsertakan pada kegiatan sosialisasi mengenai vaksin. Ketidakterlibatan tokoh masyarakat memiliki implikasi yang cukup besar. Beberapa diantaranya adalah kepercayaan masyarakat mengenai vaksin yang lebih negatif. Ada semacam anekdot mengenai vaksinasi yang hidup dan tumbuh dilingkungan masyarakat sehari-hari. Anekdot ini yang terus membentuk keyakinan masyarakat. Menghegemoni secara tidak langsung kepercayaan masyarakat, yang dampak lanjutannya pada sikap politik masyarakat yang tidak percaya vaksin yang telah di programkan oleh pemerintah. Padahal, untuk kondisi sosial masyarakat seperti yang ada di Kalimantan Selatan adalah tradisi masyarakat yang sangat kental dengan ikatan sosial. Khususnya ikatan sosial keagamaan. Modal sosial keagamaan ini yang dalam kecamatan penulis tidak digunakan sebagai salah satu kekuatan untuk menyukseskan vaksinasi nasional. Tokoh-tokoh masyarakat seperti pemuka agama akhirnya terisolasi dari kegiatan vaksinasi nasional. Padahal, simpul-simpul ini secara politik memiliki kontribusi yang sangat besar dalam menggerakkan masyarakat. Setidaknya itu terlihat di beberapa tahun belakangan.

Human focused yang meletakkan ruang partisipasi masyarakat sebagai salah satu kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif, cepat dan tepat tidak berlangsung di Kalimantan Selatan, khususnya pada konteks kegiatan vaksinasi nasional. Berkebalikan dari prinsip *agile governance*, fakta lapangan menunjukkan gagalnya realisasi vaksinasi nasional di sebabkan oleh minimnya keterlibatan dua aktor kunci yang secara politik memiliki pengaruh yang sangat besar tetapi tidak dimaskimalkan. Kedua tokoh kunci yang minim ruang partisipasinya dalam hemat penulis adalah aparat desa dengan tokoh-tokoh masyarakat seperti pemuka agama. Implikasinya, layanan yang cepat dan tepat sebagaimana yang diresepkan oleh *agile governance* pada konteks di Kalimantan Selatan berlangsung tidak optimal.

Based On Quick: Melakukan Layanan yang Cepat

Prinsip kedua yang menjadi bagian dari *agile governance* yang digunakan pada penelitian ini sebagai sebuah pendekatan adalah *based on quick*. Prinsip ini secara sederhana melihat bahwa tata kelola dan pelaksanaan pemerintahan yang tanggap dapat tercapai ketika pemerintah daerah atau organisasi publik melakukan layanan yang cepat. Kecepatan layanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi publik menjadi pra syarat agar pemerintahan yang tepat dapat terelasaki. Sebaliknya, penyebab dari lambatnya tanggapan dan respon pemerintah terhadap sebuah persoalan karena layanan yang diberikan juga cenderung lambat.

Ketika prinsip *based on quick* digunakan untuk melihat realisasi vaksinasi di Indonesia, lebih spesifik pada kasus yang terjadi di Kalimantan Selatan maka

sejauh ini dapat dibangun argumen bahwa dari kecamatan *based on quick* belum sepenuhnya berlangsung layanan yang cepat. Lambatnya layanan terkait dengan vaksinasi Covid-19 yang menjadi pemicu gagalnya pemerintah Kalimantan Selatan merealisasikan vaksinasi nasional seperti yang telah di targetkan oleh pemerintah pusat. Hemat penulis melihat bahwa lambatnya layanan terjadi pada beberapa sektor, diantaranya yang kami observasi adalah minim jangkauan ke masyarakat di pedesaan. Faktor ini punya keterkaitan dengan *human focused* yang telah di bahas sebelumnya, karena minim jangkauan ke desa-desa di Kalimantan Selatan sehingga akses layanan yang diperoleh masyarakat juga cenderung lambat dan dampak dominonya pada realisasi vaksinasi nasional yang terhambat.

Kami melihat bahwa, Kalimantan Selatan dalam letak geografis adalah daerah yang masih ditopang oleh beberapa desa yang secara geopolitik masih terisolasi. Terisolasi disini karena akses untuk menempuh desa-desa tersebut masih sulit dan terbatas. Beberapa diantaranya karena infrastruktur yang belum terlalu memadai. Belum lagi, jarak tempuh yang di butuhkan untuk menempuh daerah tersebut. Beberapa desa bahkan ada yang harus ditempuh dengan menggunakan jalur sungai terlebih dahulu. Dengan menggunakan modal transportasi kapal atau dalam istilah masyarakat sehari-hari menyebutnya dengan *klotok*. Jarak tempuh juga tidak cepat, satu atau bahkan dua jam perjalanan dibutuhkan untuk sampai di desa-desa terjauh dari ibu kota Kalimantan Selatan. Kondisi yang secara geopolitik yang jika dibenturkan dengan *based in quick* menjadi problematis. Sebab, dengan keadaan dan akses yang jaraknya jauh akan berdampak pada kualitas dan entitas layanan yang diberikan.

Hasil observasi lapangan kami terkait dengan *based on quick* sekaligus sebagai antitesa dari pandangan yang menyudutkan sekaligus mengucilkan peran pemerintah dalam hal ini pemerintah di Kalimantan Selatan. Bagi kami dengan situasi geopolitik yang ada, penyebab dari minimnya realisasi vaksin tidak sepenuhnya karena kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah Kalimantan Selatan. Sebaliknya, kami melihat bahwa ada indikasi lain yang perlu diperhatikan. Temuan ini menunjukkan jika, akses dan letak geografis menjadi variabel yang juga tidak kalah menariknya untuk dicermati. Faktanya, data lapangan kami menemukan jika akses dan letak geografis justru menjadi penghambat dari realisasi vaksinasi nasional yang berlangsung di Kalimantan Selatan. Temuan ini sekaligus memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan kelimuan. Khususnya dalam melihat prinsip *based on quick* sebagai salah satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang cepat dan tepat, atau dalam istilah lain sering juga diistilahkan sebagai pemerintahan yang tanggap. Temuan lapangan, setidaknya memberikan cara pandang yang berbeda. Bukan berarti bahwa prinsip *based on quick* tidak relevan digunakan sebagai bagian dari *agile governance*, tetapi pada konteks tertentu seperti yang ada di Kalimantan Selatan prinsip ini justru dibenturkan dengan akses dan letak geografis.

Simple Design and Continuous Refinement: Layanan yang Berkelanjutan

Prinsip terakhir yang digunakan pada penelitian ini adalah *simple design and continuous refinement*, secara sederhana prinsip ini membangun argumen bahwa pemerintahan yang cepat dan tanggap harus melakukan pelayanan yang terus menerus. Kata kunci yang dijadikan sebagai variabel penting untuk prinsip ketiga ini adalah keberlanjutan. Jika pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau organisasi publik tidak dilakukan secara terus menerus (berkelanjutan) maka pemerintahan yang cepat dan tanggap tidak akan teralisasi. Sebaliknya, pemerintah yang tanggap dan cepat hanya bisa dilakukan ketika prasyarat pelayanan yang berkelanjutan dilakukan oleh pemerintah daerah atau organisasi publik.

Untuk konteks yang berlangsung di Kalimantan Selatan dengan kasus pada realisasi vaksinasi nasional, *simple design and continuous refinement* telah dilakukan oleh pemerintah setempat. Layanan mengenai vaksinasi nasional telah dilakukan secara berkelanjutan. Indikasi ini bisa terlihat dari kesiapan pemerintah dalam menyediakan dosis vaksin mulai dari dosis vaksin pertama, kedua hingga ketiga. Hanya persoalannya terletak pada masyarakat. Meskipun perlu di garis bawahi, bahwa masyarakat disini tidak merujuk pada masyarakat secara umum. Mungkin lebih tepatnya pada beberapa oknum. Kesiapan pemerintah untuk mendistribusikan vaksinasi nasional di Kalimantan Selatan berbanding terbalik dengan kesiapan oleh masyarakat setempat. Ada semacam resistensi dan penolakan yang muncul dari masyarakat terkait dengan penerimaan vaksinasi nasional.

Wujud resisten dan penolakan terhadap vaksinasi seperti misalnya ketidak inginan masyarakat untuk divaksin. Namun, perlu dicatat bahwa resistensi dan penolakan masyarakat terhadap vaksin punya kaitan dengan faktor yang telah disebutkan sebelumnya yaitu minimnya sosialisasi mengenai vaksin itu sendiri. Sehingga di lapangan, yang terjadi adalah polarisasi informasi mengenai vaksin antara narasi buruk dan narasi soal manfaat vaksin terus menghiiasi keseharian masyarakat. Ironisnya, narasi negatif mengenai vaksinasi lebih dominan diterima oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Peran media yang cukup massif ditambah dengan berita angin yang begitu cepat menyebar serta di saat bersamaan minimnya sosialisasi dari masyarakat pada akhirnya membentuk pengetahuan masyarakat mengenai vaksin. Salah satu misalnya wacana yang berkembang dan pernah penulis dengarkan, seperti ketakutan warga untuk divaksin karena kasus kematian. Ada warga yang meninggal beberapa hari setelah divaksin. Berita ini tersebar sangat cepat, dan diyakini oleh masyarakat bahwa penyebab kematiannya adalah vaksin. Meskipun kebenarannya masih sangat problematis. Masyarakat dengan cepat mengaitkan satu kasus dengan peristiwa kematian. Hal ini semakin menumbuhkan sikap penolakan masyarakat terhadap vaksinasi nasional yang berlangsung di Kalimantan Selatan.

Resistensi dan perlawanan masyarakat secara terbuka menolak untuk divaksin menjadi penyebab utama dari rendahnya realisasi vaksin yang berlangsung di

Kalimantan Selatan. Kondisi yang pada sisi lain berimplikasi pada tingginya ketersediaan stok vaksin. Ini penting dijadikan sebagai abstraksi untuk melihat secara detail bahwa realisasi vaksin seperti yang terjadi di Kalimantan Selatan tidak sepenuhnya bersumber dari pemerintah. Namun perlu dilihat, bahwa pada konteks tertentu program yang dicanamkan oleh pemerintah khususnya yang melibatkan masyarakat sebagai *stakeholder* memegang peran yang cukup penting. Seperti kasus Kalimantan Selatan, *simple design and continuous refinement* secara konsepsi telah terealisasi dengan sangat baik oleh pemerintah, pemerintah telah menyediakan dosis vaksin dari satu, dua hingga tiga. Hanya persoalan muncul karena kesiapan pemerintah bertolak belakang dengan respon masyarakat. Akibatnya program realisasi vaksinasi nasional tidak terealisasi dengan baik.

KESIMPULAN

Temuan kami mengenai mandetnya realisasi vaksinasi nasional yang berlangsung di Kalimantan Selatan membuka ruang diskusi untuk meninjau kembali konsep *agile governance* sebagai sebuah pendekatan dalam membentuk pemerintahan yang cepat dan tanggap. Pada prakteknya, apa yang kami temukan di Kalimantan Selatan hampir seluruhnya menerapkan prinsip-prinsip *agile governance* dalam merealisasikan vaksinasi nasional, khususnya di internal pemerintah dan beberapa *stakeholder* yang terlibat pada vaksinasi nasional seperti *Human focused, Based On Quick dan Simple Design and Continuous Refinement*. Sebagaimana yang telah banyak diresepkan oleh peneliti sebelumnya yang melihat bahwa pemerintah yang cepat dan tepat akan terealisasi ketika prinsip-prinsip tersebut dijadikan sebagai nilai dalam kerja organisasi publik dan atau pemerintahan daerah (Apriliyanti et al., 2021; J.H.de O.Luna et al., 2014; Lappi et al., 2018; Soe & Drechsler, 2018; Vernanda & Negar, 2009). Kami tidak membantah bahwa tawaran tersebut bermasalah, pada konteks tertentu kami melihat bahwa prinsip-prinsip *agile governance* berkontribusi sangat besar khususnya dalam membentuk pemerintahan yang cepat dan tanggap. Pengecualian yang berlangsung di Kalimantan Selatan.

Untuk kasus di Kalimantan Selatan rendahnya realisasi vaksin nasional meskipun telah menerapkan prinsip-prinsip *agile governance* disebabkan karena faktor eksternal. Ada semacam resistennya dan penolakan dari beberapa oknum masyarakat yang tidak menerima dan secara tegas menolak untuk divaksin. Penolakan ini, yang memicu rendahnya angka realisasi vaksin di Kalimantan Selatan dan pada saat bersamaan membuat stok ketersediaan vaksin menjadi salah satu tertinggi di Indonesia. Abstraksi yang kami temukan di Kalimantan Selatan dapat menjadi pertimbangan untuk melihat realisasi vaksinasi di tempat lain. Bahwa, partisipasi masyarakat menjadi salah satu variabel yang juga mendorong keberhasilan program vaksinasi nasional. Pasalnya selama ini, rendahnya realisasi vaksinasi selalu dibenturkan dengan tingkat ketersediaan vaksin. Hal sebaliknya berlangsung di Kalimantan Selatan, stok vaksin tersedia namun realisasi vaksin masih minim. Penyebabnya, adalah partisipasi dari masyarakat yang rendah serta ada semacam resistensi yang muncul dari beberapa masyarakat untuk menolak divaksin.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, M. (2008). The good governance agenda: Beyond indicators without theory. *Oxford Development Studies*, 36(4), 379–407. <https://doi.org/10.1080/13600810802455120>
- Apriliyanti, K., Latif, M. D. I., & Mutiarin, D. (2021). Narasi Budaya Arek Suroboyo dan Pandemi Covid-19: Sebuah Perspektif Agile Governance di Kota Surabaya. *Jurnal Transformative*, 7(1), 1–28. <https://doi.org/10.21776/ub.transformative.2021.007.01.1>
- Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). Governance: From Theory to Practice. *Governance Theory and Practice*, 214–247. https://doi.org/10.1057/9780230583344_10
- Dacu, V., Adu-ampong, E., & Stoker, G. (2002). *Stoker 2002, Governance as theory, five propositions*.
- Demircioglu, M. A. (2017). Reinventing the Wheel? Public Sector Innovation in the Age of Governance. *Public Administration Review*, 77(5), 800–805. <https://doi.org/10.1111/puar.12821>
- Gerring, J., Thacker, S. C., & Moreno, C. (2005). Centripetal democratic governance: A theory and global inquiry. *American Political Science Review*, 99(4), 567–581. <https://doi.org/10.1017/S0003055405051889>
- Gerster, D., & Dremel, C. (2018). " Agile Meets Non-Agile ": Implications of Adopting Agile Practices at Enterprises. *Ambler 2001*, 1–10.
- Gibson, R. B. (2005). Kemp at all_2005_Governance for sustainable development moving.pdf. *Int. J. Sustainable Development*, 8, 12–30.
- Griffin, L. (2012). Where is Power in Governance? Why Geography Matters in the Theory of Governance. *Political Studies Review*, 10(2), 208–220. <https://doi.org/10.1111/j.1478-9302.2012.00260.x>
- Guridno, D. E., & Guridno, A. (2020). Covid-19 Impact: Indonesia Tourism in New Normal Era. *International Journal of Management and Humanities*, 4(11), 31–34. <https://doi.org/10.35940/ijmh.k1049.0741120>
- Halim, F. R., Astuti, F., Umam, K., Publik, A., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2021). Implementasi Prinsip Agile Governance Melalui Aplikasi PIKOBAR di Provinsi Jawa Barat. 7(April).
- Haque, M. S. (2003). Reinventing governance for performance in South Asia: Impacts on citizenship rights. *International Journal of Public Administration*, 26(8–9), 941–964. <https://doi.org/10.1081/PAD-120019354>
- Iriani, S. S., Nuswantara, D. A., Kartika, A. D., & Purwohandoko, P. (2021). The Impact of Government Regulations on Consumers Behaviour during the COVID-19 Pandemic: A Case Study in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(4), 939–948.

<https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no4.0939>

- J.H.de O.Luna, A., Kruchten, P., E.Pedrosa, M. L. G. do, Almeida Neto, H. R. d., & Moura, H. P. d. M. (2014). State of the Art of Agile Governance: A Systematic Review. *International Journal of Computer Science and Information Technology*, 6(5), 121–141. <https://doi.org/10.5121/ijcsit.2014.6510>
- Lappi, T., Karvonen, T., Lwakatare, L. E., Aaltonen, K., & Kuvaja, P. (2018). Toward an Improved Understanding of Agile Project Governance: A Systematic Literature Review. *Project Management Journal*, 49(6), 39–63. <https://doi.org/10.1177/8756972818803482>
- Luna, A. J. H. D. O. (n.d.). *Foundations for an Agile Governance Manifesto : a bridge for business agility Fundamentos para um Manifesto da Governança Ágil : uma ponte para agilidade nos negócios*. 2016.
- Luna, A. J. H. D. O., Kruchten, P., & Moura, H. (n.d.). *Constructing a Theory of Agile Governance : a step towards Business Agility*. 1–8.
- Marinho, M. L. M., & Moura, H. P. De. (2019). Agile governance theory : operationalization. *Innovations in Systems and Software Engineering*. <https://doi.org/10.1007/s11334-019-00345-3>
- Media, I. (2022). Capaian vaksinasi Covid-19 di Kalsel tak capai target. *Media Indonesia*.
mediaindonesia.com/nusantara/473755/bpkp-capaian-vaksinasi-covid-19-di-kalsel-tak-capai-target
- Nugroho, I., Negara, P. D., & Yuniar, H. R. (2018). the Planning and the Development of the Ecotourism and Tourism Village in Indonesia: a Policy Review. *Journal of Socioeconomics and Development*, 1(1), 43–51. <https://doi.org/10.31328/jsed.v1i1.532>
- Qumer, A. (2008). *A framework to support the evaluation , adoption and improvement of agile methods in practice*. 81, 1899–1919. <https://doi.org/10.1016/j.jss.2007.12.806>
- Salahudin, S. et al. (2020). Analysis of Government Official Twitters during Covid-19 Crisis in Indonesia Analysis of Government Official Twitters during Covid-19 Crisis in Indonesia. *Talent Development & Excellence*, 12(June), 3899–3915.
- Soe, R. M., & Drechsler, W. (2018). Agile local governments: Experimentation before implementation. *Government Information Quarterly*, 35(2), 323–335. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.11.010>
- Soundararajan, V., Sahasranamam, S., Khan, Z., & Jain, T. (2020). Multinational enterprises and the governance of sustainability practices in emerging market supply chains : An agile governance perspective. *Journal of World Business*, September, 101149. <https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101149>
- Suryahadi, A., Widyanti, W., Perwira, D., & Sumarto, S. (2010). *Bulletin of Indonesian Economic Studies MINIMUM WAGE POLICY AND ITS IMPACT*

ON. October 2014, 37–41. <https://doi.org/10.1080/00074910302007>

- Vernanda, R., & Negar, L. A. (2009). *Kesiapan Indonesia Menuju Agile Governance Rengga Vernanda Indonesia ' s Readiness Towards Agile Governance*. 1–6.
- Williams, D., & Young, T. (1994). Governance, the World Bank and Liberal Theory. *Political Studies*, 42(1), 84–100. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.1994.tb01675.x>
- Williamson, O. E. (2002). The theory of the firm as governance structure: From choice to contract. *Journal of Economic Perspectives*, 16(3), 171–195. <https://doi.org/10.1257/089533002760278776>
- Yuniti, I. G. A. D., Sasmita, N., Komara, L. L., Purba, J. H., & Pandawani, N. P. (2020). The impact of covid-19 on community life in the province of Bali, Indonesia. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(10), 1918–1929. <https://doi.org/10.37200/IJPR/V24I10/PR300214>